

IMPLEMENTASI KEPMENDIKBUDRISTEK NOMOR 56/M/2022 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN KURIKULUM DI SMK PGRI 1 NGANJUK

* Imam Fachruddin¹⁾, Indrawati²⁾ Teguh pramono³⁾

1), 2), 3) Prodi Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Kadiri, Indonesia

*Email Korespondensi: imamfachrudin@unik-kediri.ac.id

Submitted: 17-09-2024 | Accepted: 04-12-2024 | Published: 05-12-2024

Kata Kunci:

Implementasi
Kebijakan;
Kurikulum
Merdeka;
Pemulihan
Pembelajaran

Keywords:

Policy
Implementation;
Kurikulum
Merdeka;
Learning
Recovery

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi Kurikulum Merdeka di SMK PGRI 1 Nganjuk sesuai dengan Kepmendikbudristek No. 56/M/2022, yang berfokus pada pemulihan belajar pasca-pandemi. Kurikulum ini memberi fleksibilitas bagi sekolah, guru, dan siswa untuk berinovasi dan belajar secara mandiri. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan model interaktif Miles dan Hubermans, penelitian ini mengevaluasi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil menunjukkan implementasi Kurikulum Merdeka berjalan cukup baik di SMK PGRI 1 Nganjuk, dengan komunikasi efektif dan sumber daya yang memadai, meskipun ada keterbatasan informasi. Sinergi antara guru dan tenaga kependidikan menjadi faktor pendukung utama, sedangkan hambatan meliputi keterbatasan teknologi digital, kurangnya mitra industri, dan minimnya keterlibatan sebagian guru dalam mengaplikasikan kurikulum baru ini.

Abstract

This study examines the implementation of the Kurikulum Merdeka at SMK PGRI 1 Nganjuk in line with the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology Regulation No. 56/M/2022, focusing on post-pandemic learning recovery. The curriculum provides flexibility for schools, teachers, and students to innovate and pursue independent learning. Employing a descriptive qualitative method with an interactive model approach by Miles and Huberman, this study evaluates communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Findings indicate that the Kurikulum Merdeka has been implemented fairly well at SMK PGRI 1 Nganjuk, with effective communication and adequate resources, despite some informational limitations. The synergy between teachers and educational staff is a primary supporting factor, while obstacles include digital technology limitations, lack of industry partners relevant to certain school departments, and limited involvement of some teachers in applying the new curriculum.

PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan menjadi tantangan utama dalam pembangunan sektor pendidikan di Indonesia. Berbagai indikator menunjukkan bahwa kualitas hasil belajar siswa masih relatif rendah, dengan sedikit peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir (Kasus et al., 2022). Dalam konteks ini, sistem pendidikan di Indonesia menghadapi krisis pembelajaran yang, jika tidak segera diatasi, dapat memperburuk kondisi pendidikan di negara ini. Krisis ini diperparah oleh pandemi COVID-19, yang secara tiba-tiba mengubah pola pendidikan nasional. Perubahan paling mencolok terjadi pada transisi dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ), yang disertai dengan penurunan intensitas kegiatan belajar mengajar, baik dari sisi jumlah hari belajar dalam seminggu maupun rata-rata jam belajar dalam sehari (Vidieyanti et al., 2022).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud, sekarang Kemendikbudristek) telah mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi dampak pandemi terhadap ketertinggalan (*learning loss*) dan kesenjangan pembelajaran (*learning gap*) (Cholilah et al., 2023). Pada Agustus 2020, Kemendikbud memperkenalkan kurikulum darurat bagi sekolah dalam kondisi khusus, yang merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Evaluasi terhadap kurikulum darurat setelah satu tahun ajaran menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti kurikulum ini memperoleh hasil asesmen yang lebih baik dibandingkan dengan pengguna penuh Kurikulum 2013, tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi mereka.

Namun, intervensi ini berfungsi sebagai kebijakan sementara untuk mengurangi dampak *learning loss* dan *learning gap* selama pandemi. Diperlukan pengembangan kurikulum yang lebih komprehensif untuk mengatasi krisis pembelajaran yang mendesak di Indonesia. Setelah masa kurikulum darurat, Nadiem Makarim menetapkan *Kurikulum Merdeka* pada 10 Desember 2019 sebagai penyempurnaan Kurikulum 2013 (Anwar et al., 2022; Jojor & Sihotang, 2022). *Kurikulum Merdeka* membawa konsep "Merdeka Belajar," yang berbeda dari Kurikulum 2013, memberikan kebebasan kepada sekolah, guru, dan siswa untuk berinovasi, belajar secara mandiri, dan kreatif, dengan peran guru sebagai penggerak (Sherly et al., 2020). Implementasi *Kurikulum Merdeka* dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebijakan yang memberi keleluasaan pada sekolah.

Pendataan kesiapan sekolah untuk Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) oleh Kemendikbudristek menunjukkan bahwa ribuan sekolah negeri dan swasta siap melaksanakan IKM: 35.334 sekolah dalam kategori *mandiri belajar*, 59.429 dalam kategori *mandiri berubah*, dan 3.607 dalam kategori *mandiri berbagi*, yang mulai diterapkan pada tahun ajaran 2022/2023 di jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Untuk jenjang Sekolah Menengah Atas, implementasi dimulai di kelas 10 pada tahun pertama. Pemerintah mendukung implementasi ini dengan menyediakan perangkat ajar berupa buku teks dan materi pendukung, pelatihan, sumber belajar bagi guru, kepala sekolah, dan pemerintah daerah, serta jaminan jam mengajar dan tunjangan profesi guru (Lestari et al., 2023; Marsela Yulianti et al., 2022).

Penerbitan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum untuk Pemulihan Belajar merupakan bentuk dukungan penuh terhadap penyempurnaan kurikulum di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan *Pelajar Pancasila* sebagai bagian dari visi Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui implementasi *Kurikulum Merdeka*.

Penelitian terkait penerapan *Kurikulum Merdeka* dan konsep *Merdeka Belajar* di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) masih jarang dilaporkan. Sebagian besar studi tentang *Kurikulum Merdeka* lebih berfokus pada jenjang perguruan tinggi. Implementasi *Kurikulum Merdeka* di tingkat SMA menawarkan peluang menarik bagi para peneliti untuk melakukan analisis yang lebih mendalam. Beberapa penelitian tentang *Kurikulum Merdeka Belajar* telah dilakukan oleh Amalia (2023), Hartoyo & Rahmadayanti (2022), serta Neli (2023). Ketiga studi ini menunjukkan bahwa, meskipun masih baru, *Kurikulum Merdeka Belajar* telah memberikan dampak positif pada kualitas pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia. Kebebasan yang diberikan kepada guru dan fleksibilitas kurikulum memungkinkan adaptasi yang lebih baik terhadap kebutuhan siswa. Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesiapan guru dan sekolah dalam memahami serta menerapkan kurikulum ini secara efektif.

Untuk memperluas pemahaman dan meningkatkan penerapan *Kurikulum Merdeka* secara nasional, diperlukan penelitian lanjutan di sekolah-sekolah dengan berbagai latar belakang. Penelitian-penelitian ini akan membantu mengidentifikasi

tantangan yang masih dihadapi, sehingga *Kurikulum Merdeka* dapat dioptimalkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

SMK PGRI 1 Nganjuk adalah salah satu sekolah yang mulai menerapkan *Kurikulum Merdeka* pada tahun 2022 sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum untuk Pemulihan Belajar, Pengembangan, dan Pembelajaran. SMK PGRI 1 Nganjuk merupakan sekolah swasta yang bukan bagian dari proyek percontohan *Kurikulum Merdeka* di Kabupaten Nganjuk. Aturan ini menetapkan bahwa struktur kurikulum di SMK terbagi menjadi dua, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil *Pelajar Pancasila* dalam *Kurikulum Merdeka* di SMK PGRI 1 Nganjuk dialokasikan sekitar 30% dari total jam pelajaran (JP) tahunan. Saat ini, SMK PGRI 1 Nganjuk menerapkan *Kurikulum Merdeka* secara mandiri dengan opsi "Mandiri Berubah." Opsi ini memberikan fleksibilitas kepada sekolah dalam mengadopsi *Kurikulum Merdeka* menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan untuk kelas 1, 4, 7, dan 10. Pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), implementasi kurikulum berada dalam Fase E, yaitu tahap implementasi untuk kelas X. Berdasarkan latar belakang ini, peneliti bermaksud menganalisis dan mendeskripsikan lebih mendalam mengenai implementasi *Kurikulum Merdeka Belajar* di SMK PGRI 1 Nganjuk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sebagai jenis penelitian deskriptif, penelitian ini masuk dalam kategori studi kasus yang bertujuan mempelajari secara mendalam latar belakang, kondisi saat ini, serta interaksi lingkungan dari suatu unit sosial, baik itu individu, kelompok, atau komunitas (Moleong, 2017). Lokasi penelitian adalah SMK PGRI 1 yang terletak di JL. Barito 112, Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada implementasi *Kurikulum Merdeka* yang telah dijalankan oleh SMK PGRI 1 Nganjuk sejak 2022, di mana sekolah ini berhasil beralih dari opsi "Mandiri Belajar" ke "Mandiri Berubah" dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

Penelitian ini berfokus pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sesuai dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III. Penentuan informan dilakukan secara purposif berdasarkan penguasaan

dan kedalaman informasi yang dimiliki. Informan dalam penelitian ini meliputi kepala sekolah, pengawas sekolah, wakil kepala kurikulum, guru penggerak, dan peserta didik.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kepmendikbudristek Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Belajar Pengembangan & Pembelajaran di SMK PGRI 1 Nganjuk

1. Komunikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data terkait indikator transmisi dalam penerapan kurikulum perubahan di SMK PGRI 1 Nganjuk, diketahui bahwa sekolah ini telah menjalankan seluruh proses penyampaian informasi dengan efektif melalui berbagai tahapan dan asesmen yang diperlukan untuk masuk dalam skema Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). Tahapan tersebut mencakup sosialisasi IKM, pengajuan dan pendataan sekolah, serta perubahan kurikulum dari “mandiri belajar” menjadi “mandiri berubah.”

Pada indikator kejelasan, penyampaian informasi mengenai pelaksanaan *Kurikulum Merdeka* di SMK PGRI 1 Nganjuk dinilai sangat jelas. Kejelasan ini tercermin dari pemahaman yang baik oleh seluruh elemen sekolah terkait setiap proses, mulai dari sosialisasi IKM hingga persyaratan teknis seperti Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP), dan Acuan Tujuan Pembelajaran (ATP). Kejelasan ini terbantu oleh peran lima Guru Penggerak yang aktif memberikan pemahaman mendalam mengenai *Kurikulum Merdeka*, sehingga, menurut peneliti, instruksi mengenai pelaksanaan *Kurikulum Merdeka* di SMK PGRI 1 Nganjuk telah terlaksana dengan baik. Hal ini ditunjukkan melalui kompetensi setiap perangkat sekolah dalam memahami aspek teknis yang dibutuhkan untuk menjalankan kurikulum mandiri berubah di sekolah tersebut.

Konsistensi instruksi dalam pelaksanaan *Kurikulum Merdeka* di SMK PGRI 1 Nganjuk juga terjaga dengan baik. Peraturan yang diterapkan tidak mengalami

perubahan, khususnya dalam penerapan *Kurikulum Merdeka* sesuai dengan Kepmendikbudristek Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Belajar, Pengembangan, dan Pembelajaran. Konsistensi ini terlihat tidak hanya dalam penerapan regulasi sebagai pedoman sekolah, tetapi juga dalam aspek teknis pengelolaan kurikulum mandiri berubah. Data dari website Kemendikbud menunjukkan bahwa SMK PGRI 1 Nganjuk tetap menjalankan kurikulum mandiri berubah tanpa perubahan pada pola implementasi.

2. Sumberdaya

Sumber daya berperan krusial dalam implementasi kebijakan, mencakup sumber daya manusia, keuangan, dan peralatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan. Agar kebijakan berjalan efektif, diperlukan kesesuaian jumlah staf dengan kompetensi yang relevan terhadap tugas yang diberikan. Berdasarkan observasi dan dokumentasi, SMK PGRI 1 Nganjuk memiliki 83 guru dan 22 tenaga kependidikan, yang secara sinergis mendukung implementasi *Kurikulum Merdeka* mandiri berubah di sekolah ini.

Pada aspek informasi, tidak ditemukan kesalahpahaman signifikan terkait struktur *Kurikulum Merdeka*, asesmen, capaian pembelajaran, maupun alur tujuan pembelajaran. Hal ini didukung oleh adanya pendampingan dan pelatihan mandiri atau kelompok, seperti melalui Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Forum Group Discussion (FGD), dan komunitas guru lain. Guru-guru juga aktif berbagi praktik terbaik, mengakses konten pembelajaran secara mandiri melalui buku, webinar, dan platform digital seperti aplikasi *Merdeka Mengajar*.

Kewenangan untuk implementasi *Kurikulum Merdeka* di SMK PGRI 1 Nganjuk diberikan melalui Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 028/H/Kr/2023, yang mencantumkan sekolah sebagai pelaksana *Kurikulum Merdeka* mandiri berubah pada laman resmi Kemendikbud. Ke depan, SMK PGRI 1 Nganjuk bercita-cita menjadi sekolah yang melaksanakan *Kurikulum Merdeka* mandiri berbagi.

Dalam hal fasilitas, sarana fisik yang diperlukan mencakup gedung, tanah, dan infrastruktur lainnya yang mendukung kelancaran kebijakan. Edward menyatakan bahwa keterbatasan fasilitas dapat menghambat efektivitas kebijakan, karena pelaku kebijakan akan kesulitan mengakses informasi yang akurat dan andal.

Implementasi *Kurikulum Merdeka* di SMK PGRI 1 Nganjuk memerlukan beberapa peralatan pendukung, seperti AC, proyektor, komputer, televisi, kipas angin, printer, Wi-Fi, dan jaringan LAN. Sementara itu, prasarana penunjang mencakup berbagai ruang pelayanan, antara lain ruang tunggu tamu, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, perpustakaan, laboratorium bahasa Inggris, laboratorium teknik komputer jaringan, laboratorium desain, ruang UKS, ruang OSIS, ruang musik, ruang kelas, koperasi sekolah, kantin, pantry, gudang, toilet siswa, lapangan upacara, dan taman.

3. Disposisi

Berdasarkan wawancara, efek disposisi dan pengaturan dalam pemilihan pelaksana *Kurikulum Merdeka* di SMK PGRI 1 Nganjuk belum optimal, terutama karena masih ada kendala dalam pemanfaatan perangkat ajar digital. Temuan ini didukung oleh hasil observasi dan dokumentasi yang menunjukkan bahwa banyak guru belum memanfaatkan perangkat ajar berbasis digital secara maksimal, akibat keterbatasan pengetahuan dalam penerapan teknologi untuk pembelajaran siswa. Hal ini menjadi catatan penting bagi pelaksana *Kurikulum Merdeka* di SMK PGRI 1 Nganjuk untuk meningkatkan kompetensi digital para guru.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya implementasi *Kurikulum Merdeka*, SMK PGRI 1 Nganjuk mengalokasikan anggaran insentif bagi para pakar yang menyampaikan materi sosialisasi kurikulum dan penerapannya kepada siswa. Berdasarkan laporan LKJIP 2022, total anggaran kegiatan ini mencapai Rp 39.050.000,00. Insentif untuk setiap pemateri sebesar Rp 900.000,00, dengan total pengeluaran insentif Rp 3.600.000,00 untuk empat pemateri. Peneliti mengamati bahwa insentif ini diberikan khusus kepada pemateri yang berperan dalam sosialisasi dan pengarahan terkait *Kurikulum Merdeka*.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan, yang mencakup struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan antarunit organisasi, serta interaksi organisasi dengan pihak eksternal. Struktur birokrasi terdiri dari dua karakteristik utama: penyusunan SOP dan pelaksanaan fragmentasi. Dalam implementasi *Kurikulum Merdeka* mandiri berubah, SMK PGRI 1 Nganjuk telah menetapkan standar dan indikator yang tercantum dalam Kepmendikbudristek Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum untuk Pemulihan Belajar, sehingga

kegiatan dapat berjalan sesuai sasaran. Seluruh bagian sekolah mengikuti pedoman SOP yang ada, dan fragmentasi tugas terlaksana dengan baik. Pembagian tugas di SMK PGRI 1 Nganjuk terbagi dengan jelas pada setiap jabatan, sehingga tiap bagian dalam perangkat sekolah atau tim pelaksana memahami perannya dalam implementasi *Kurikulum Merdeka* mandiri berubah.

B. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kepmendikbudristek Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Belajar Pengembangan & Pembelajaran di SMK PGRI 1 Nganjuk

1. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan, salah satu kendala utama dalam implementasi program *Kurikulum Merdeka* mandiri berubah di SMK PGRI 1 Nganjuk adalah rendahnya partisipasi beberapa guru dalam penerapan kurikulum, terutama akibat keterbatasan dalam penguasaan teknologi digital dan pemahaman teknis mengenai kurikulum yang diimplementasikan. Banyak guru yang belum memanfaatkan perangkat ajar berbasis digital karena kurangnya pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran.

Selain itu, terdapat tantangan dalam menjalin kemitraan yang relevan dengan setiap jurusan di SMK PGRI 1 Nganjuk. Kerja sama yang terjalin selama ini hanya mencakup mitra tertentu yang sesuai dengan beberapa jurusan, seperti TPM, TKRO, TIPTL, dan TLAS TAV, dengan mitra seperti Daihatsu, Astra Honda Motor, INKA, Axioo, Kementerian Pekerjaan Umum, BSD, dan Samsung Tech. Namun, jurusan Desain Komunikasi Visual (DKV) belum memiliki kemitraan formal (MOU).

2. Faktor Pendukung

Salah satu faktor pendukung utama dalam implementasi kurikulum adalah sinergi antara seluruh perangkat sekolah, baik guru maupun tenaga kependidikan, terutama dalam meningkatkan kompetensi digital guna menunjang keterampilan siswa. Kerja sama ini terlihat ketika terdapat guru senior yang kurang terampil dalam penggunaan perangkat digital; dalam situasi tersebut, tenaga pendidik lainnya memberikan dukungan dengan mempersiapkan dan menyediakan sarana digital yang dibutuhkan untuk pembelajaran siswa. Kolaborasi ini memastikan bahwa perangkat ajar yang diperlukan dapat diimplementasikan secara efektif, meskipun membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dalam proses belajar-mengajar.

KESIMPULAN

Komunikasi dalam implementasi Kepmendikbudristek Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum untuk Pemulihan Belajar, Pengembangan, dan Pembelajaran di SMK 1 PGRI Nganjuk berjalan efektif melalui penerapan aspek transmisi, kejelasan, dan konsistensi kebijakan. Hal ini tercermin dari pemahaman SMK 1 PGRI Nganjuk dalam melaksanakan tugas sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Kepmendikbudristek Nomor 56/M/2022, yang mendukung pemulihan dan pengembangan pembelajaran secara optimal.

Sementara itu, pelaksanaan sumber daya dalam implementasi Kepmendikbudristek Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum untuk Pemulihan Belajar, Pengembangan, dan Pembelajaran di SMK 1 PGRI Nganjuk berjalan cukup baik, dengan pemenuhan pada 3 dari 4 aspek sumber daya. Aspek yang terpenuhi mencakup sumber daya manusia, fasilitas, dan wewenang. Namun, masih terdapat kekurangan pada aspek sumber daya informasi.

Disposisi dalam implementasi Kepmendikbudristek Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum untuk Pemulihan Belajar, Pengembangan, dan Pembelajaran di SMK 1 PGRI Nganjuk berjalan dengan baik, di mana seluruh pelaksana menjalankan tugasnya secara efektif meskipun tanpa insentif khusus, kecuali bagi pemateri yang memberikan sosialisasi terkait kurikulum mandiri berubah.

Struktur birokrasi dalam implementasi Kepmendikbudristek Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum untuk Pemulihan Belajar, Pengembangan, dan Pembelajaran di SMK 1 PGRI Nganjuk berjalan dengan baik, di mana seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan fragmentasi yang terstruktur di antara unit-unit perangkat sekolah.

Faktor pendukung dalam implementasi Kepmendikbudristek Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum untuk Pemulihan Belajar, Pengembangan, dan Pembelajaran di SMK PGRI 1 Nganjuk adalah sinergi yang kuat antara guru dan tenaga kependidikan. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat, antara lain ketidaksiapan beberapa guru dalam menerapkan teknologi digital serta kesulitan dalam menjalin kemitraan yang sesuai dengan jurusan di SMK PGRI 1 Nganjuk. Kerja sama yang sudah terjalin mayoritas berasal dari jurusan TPM, TKRO, TIPTL, TAV, TSM,

DPIB, TKJ, dan TLAS, sedangkan jurusan DKV belum memiliki perjanjian kerja sama (MOU).

REFERENSI

- Amalia, I. D. (2023). IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DALAM MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN FIQIH DI MAN 1 NGANJUK. In *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG*.
- Anwar, Sukino, & Erwin. (2022). KOMPARASI PENERAPAN KURIKULUM MERDEKA DAN K-13 DI SMA ABDUSSALAM. *JPDSH Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 2(1). <https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH>
- Cholilah, M., Gratia Putri Tatuwo, A., Prima Rosdiana, S., & Noor Fatirul, A. (2023). Pengembangan Kurikulum Merdeka Dalam Satuan Pendidikan Serta Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran Abad 21. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 01(02), 57–66. <https://doi.org/10.58812/spp.v1.i02>
- Hartoyo, A., & Rahmadayanti, D. (2022). Potret Kurikulum Merdeka, Wujud Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(4), 2247–2255.
- Jojo, A., & Sihotang, H. (2022). Analisis Kurikulum Merdeka dalam Mengatasi Learning Loss di Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Studi Kasus Kebijakan Pendidikan). *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(4), 5150–5161. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.3106>
- Kasus, S., Sman, P., Kabupaten Banjar, P., Fauzi, A., Keguruan, F., Pendidikan, D. I., Achmad, U., & Banjarmasin, Y. (2022). IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DI SEKOLAH PENGGERAK. In *Jurnal Pahlawan* | (Vol. 18, Issue 2). Oktober Thn. <https://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/pahlawan/>
- Lestari, D., Asbari, M., & Yani, E. E. (2023). Kurikulum Merdeka: Hakikat Kurikulum dalam Pendidikan. *JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT*, 02(05). <https://lipi.go.id/id/>
- Marsela Yulianti, Divana Leli Anggraini, Siti Nurfaizah, & Anjani Putri Belawati Pandiangan. (2022). PERAN GURU DALAM MENGEMBANGAN KURIKULUM MERDEKA. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 1(3), 290–298. <https://doi.org/10.58540/jipsi.v1i3.53>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- NELI, H. (2023). IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR MATA PELAJARAN KE-NU-AN KELAS XI DI SMK MA'ARIF NU 1 AJIBARANG BANYUMAS. In *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO*.
- Sherly, Dharma, E., & Betty Sihombing. (2020). MERDEKA BELAJAR: KAJIAN LITERATUR. *Konferensi Nasional Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Banjarmasin*, 183–190.

- Sugiyono. (2018). Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, 6.
- Vidieyanti, N., Rini, R., & Syafrudin, U. (2022). Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Pasca Covid-19 dengan Pengimplementasian Kurikulum Merdeka. *Satya-Sastraharing*, 6(2). <https://doi.org/10.33363/satya-sastraharing.v6i2.926>